

IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)

SKIPRISI



Diajukan oleh :

Ayusalam Yustifebri Puteri

0813010038/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2012

IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB
PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Diajukan oleh :

Ayusalam Yustifebri Puteri

0813010038/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO” dapat diselesaikan dengan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa jenjang pendidikan Strata-1 (Sarjana) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna memperoleh gelar kesarjanaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, Mp., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanudin Nur, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”.
3. Bapak Drs.Ec. H. R.A Suwaidi, MS., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, Msi., selaku Kaprogdi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. DR. INDRAWATI YUHERTIANA, MM, AK selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelatenan dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
8. Alm. Ayah saya dan Mama serta kakak saya tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seseorang yang telah memberi ide untuk permasalahan skripsi ini dan telah membantu, mensupport saya.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2008, khususnya kepada sahabatku tercinta Desy, Reny, Nikita, dan Puspita, terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak tersebut diatas. Dalam penyusunan skripsi ini , penulis

menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulis menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi referensi pendidikan kita semua.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)

Oleh

Ayusalam Yustifebri Puteri

ABSTRAK

Dunia perpajakan di Indonesia, telah dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk rajin dan taat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Motto “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunannya” juga semakin melekat sebagai tanda kejujuran terhadap penggunaan pajak. Namun, di tengah melonjaknya perbaikan perpajakan di Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam masalah pajak. Kasus yang begitu mengejutkan adalah kasus “Gayus Tambunan”.

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Probability Sampling yang berupa Simple Random Sampling yaitu para wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Analisis yang digunakan adalah Mean, Standar Deviasi, Range dan Nilai Ekstrem.

Ditengah buruknya persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia, dorongan untuk tetap berbakti kepada Negara untuk tetap membayar pajak masih tetap dipegang oleh para Wajib Pajak. Fenomena Gayus Tambunan memang telah merasuk dalam diri, jiwa dan persepsi Wajib Pajak dengan berbagai hasil. Gayus Tambunan telah mampu membuka mata dan sikap Wajib Pajak dalam menyingkapi dunia perpajakan Indonesia.

Keywords : Kesadran Wajib Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	13

2.2.1	Pajak	13
2.2.1.1	Pengertian Pajak	13
2.2.1.2	Fungsi-Fungsi Pajak	17
2.2.1.3	Syarat Pemungutan Pajak	17
2.2.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	18
2.2.2	Kesadaran Wajib Pajak	19
2.2.2.1	Pemahaman Wajib Pajak	19
2.2.2.2	Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	19
2.2.2.3	Teori yang mendukung Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak	20
2.2.2.4	Pengaruh Kasus Gayus Tambunan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	24
3.1.1	Definisi Operasional Variabel	24
3.1.2	Pengukuran Variabel	24

3.2	Teknik Pengumpulan Sampel	27
3.2.1	Populasi	27
3.2.2	Sampel	27
3.3	Teknik Pengumpulan Data	29
3.3.1	Jenis Data	29
3.3.2	Sumber Data	29
3.3.3	Teknik Pengumpulan Data	29
3.4	Uji Kualitas Data	30
3.4.1	Uji Validitas	30
3.4.2	Uji Reabilitas	31
3.5	Teknik Analisis	31
3.5.1	Analisa Statistik Deskriptif	31

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	34
4.1.1	Sejarah Kantor Pajak Pratama Surabaya	
	Mulyorejo	34

4.1.1.1	Visi dan Misi KPP Surabaya Mulyorejo	37
4.1.1.2	Visi Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Mulyorejo	37
4.1.1.3	Misi Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Mulyorejo	37
4.1.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	38
4.1.2	Deskripsi Wajib Pajak	41
4.1.2.1	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	43
4.2	Deskripsi Pengumpulan Sampel	44
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.4	Uji Kualitas Data	45
4.4.1	Uji Validitas Data	45
4.4.2	Uji Reliabilitas Data	47
4.5	Demografi Responden	48
4.5.1	Distribusi Frekuensi Identitas Responden	49
4.5.2	Kesadaran Wajib Pajak Setelah Adanya Kasus	

Gayus Tambunan	52
4.6 Hasil Statistik Deskriptif	58
4.7 Pembahasan	62
4.7.1 Implikasi Hasil Penelitian	62
4.7.2 Perbedaan Dengan Penelitian Terhadulu	64
4.7.3 Keterbatasan Penelitian	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel	27
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.2 Uji Validitas	46
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.4 Jenis Responden Yang Menerima Kuesioner	48
Tabel 4.5 Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.6 Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4.7 Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.8 Meskipun ada kecurangan yang dilakukan Gayus Tambunan Saya tetap membayar pajak karena merupakan kewajiban Saya sebagai warga Negara	52
Tabel 4.9 Dengan adanya Kasus Gayus Tambunan Dirjen Pajak diharapkan untuk melakukan sosialisasi guna mengembalikan kepercayaan para Wajib Pajak	52
Tabel 4.10 Berkurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap petugas pajak dikarenakan adanya kasus Gayus Tambunan	53

Tabel 4.11 Dengan adanya Kasus Gayus Tambunan sangat mempengaruhi kondisi perpajakan di Indonesia	54
Tabel 4.12 Walaupun ada Kasus Gayus Tambunan Saya tetap merasa yakini bahwa pajak yang sudah Saya bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan Negara	54
Tabel 4.13 Melemahnya Wajib Pajak untuk membayar pajak karena banyak korupsi di Pemerintahan	55
Tabel 4.14 Pajak merupakan alat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat	55
Tabel 4.15 Saya menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	56
Tabel 4.16 Dengan tidak membayar pajak Saya akan sangat merugikan Negara	56
Tabel 4.17 Saya menyadari bahwa pembayaran pajak dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara	57
Tabel 4.18 Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain meskipun ada kasus Gayus Tambunan	57
Tabel 4.19 Tabel Mean	58
Tabel 4.20 Tabel Standar Deviasi	59
Tabel 4.21 Tabel Range	60
Tabel 4.22 Tabel Nilai Minimum	61
Tabel 4.23 Tabel Nilai Maksimum	62

Tabel 4.24 Tabel Rangkuman Perbedaan Penelitian Sekarang Dengan	
Penelitian Terdahulu	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Reliability
2. Item Total Statistics
3. Frequency Table
4. Statistics
5. Indikator Penelitian
6. Kuesioner
7. Rekapitan Hasil Kuesioner Tertutup
8. Rekapitan Hasil Kuesioner Terbuka
9. Tabel r

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur KPP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk menyerahkan upeti kepada raja yang besarnya sudah ditentukan. Pemungutan pajak atau upeti ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Bahkan setelah Indonesia merdeka pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun oleh pemerintah yang berkuasa (Prastiwi, 2011: 1).

Negara Republik Indonesia memiliki misi nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Strategi pokok yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut yaitu melalui pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar guna mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Contoh dari sumber dana luar negeri adalah pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan contoh dari sumber dana dalam negeri adalah penjualan migas dan non migas serta pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010, rencana penerimaan pajak sebesar Rp 604,4 triliun merupakan 62% dari pendapatan negara atau 12% terhadap Produk Domestik Bruto (Nota Keuangan dan APBN, 2010) (Rahman,2010).

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan besarnya porsi penerimaan pajak dibandingkan dengan total penerimaan Negara dalam APBN. Pada tahun 2008, porsi penerimaan pajak adalah sebesar 68,33%, dan untuk tahun 2009 meningkat menjadi 74,86% (Badan Kebijakan Fiskal www.fiskal.depkeu.go.id dalam Hidayat dan Nugroho, 2010).

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan mengalami reformasi dengan ditetapkannya beberapa Undang-undang Perpajakan. Sejak reformasi diberikan keparcayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, melaporkan, dan memperhitungkan pajaknya sendiri. Sehingga aparat pajak hanya bertugas mengawasi, melayani dan memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sejak penerapan self assessment system, diperlukan kesadaran dan kapatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2011 : 4).

Pelaksanaan Self Assesment System dalam perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada negara. Artinya, bahwa wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh oleh negara. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak sera merta diberikan begitu saja. Aparat pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu peran dengan fungsi pelayanan, pembinaan, atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayanan publik.

Aparat pajak sebagai publik tentu harus mampu melayani wajib pajak dalam melaksanakan serangkaian proses pembayaran pajak. Kelemahan dari sistem selft assessment adalah wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan dengan tidak benar dan mngelek dari pajaknya. Upaya untuk mengurangi pengelakan pajak adalah dengan pemeriksaan pajak.

Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah adanya kemampuan masyarakat yaitu dapat menghitung pajaknya sendiri. Adapaun alat yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah akuntansi. Kepercayaan yang diberikan terhadap wajib pajak ini bisa

disalahartikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya aparat perpajakan berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap ada aturannya.

Upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberikan kepercayaan melalui self assessment system adalah dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Prastiwi, 2011 : 4).

Salah satu bentuk peran positif wajib pajak adalah sikap keterbukaan wajib pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembukuan dengan memberkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah dikawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005. Salah satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayati dan Supriyati, 2008).

Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) dalam (Hidayati dan Supriyadi, 2008). Menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib pajak mematuhi ketentuan pajak. Hal ini tercermin dari tiga hal. Pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administratif, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih sangat tinggi. Ketiga, adanya adanya indikasi beberapa wajib pajak melakukan pemalsuan dokumen maupun keberadaan usahanya.

Persoalannya sekarang adalah bahwa lingkaran antara ketidakpatuhan pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai dengan aturan main masih saja berputar. Memulai pembenahan terhadap kualitas aparat pajak itu sendiri merupakan awal yang sangat penting untuk memutus lingkaran yang terlanjur lama berputar. Tingkat kepatuhan wajib pajak memang tidak semata-mata hanya menjadi tuntutan bagi wajib pajak, akan tetapi perlu didorong dengan dukungan tingginya tingkat kualitas aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa kualitas pajak yang baik tampaknya cita-cita untuk menjadikan pajak sebagai tumpuan harapan pembiayaan pembangunan diatas tangan sendiri masih sangat jauh mengawan.

Kontrol dari aparat pajak yang profesional diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan kontrol maka kesempatan melakukan kecurangan (penghindaran pajak) oleh wajib pajak, apapun caranya dapat dicegah. Fungsi profesionalisme aparat pajak kemudian akan menjadi pagar bagi terciptanya celah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan (Puspitasari, Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak).

Dewasa ini, kasus korupsi yang sangat hangat-hangatnya dibicarakan adalah kasus mengenai Gayus Tambunan. Kasus Gayus Tambunan yang meledak pada Bulan April 2010 telah mencoreng wajah dunia perpajakan Indonesia. Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan fiskal berada di Departemen Keuangan, dimana tugas dan wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan visi Direktorat Jendral Pajak untuk menjadi institusi pemerintah yang dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat terutama dengan munculnya kasus penggelapan pajak pada awal tahun 2010 oleh salah satu fiskusnya yang diduga sebagai Makelar Kasus Pajak, Gayus Tambunan. Kasus tersebut muncul ketika salah satu

pegawai Direktorat Jendral Pajak menyalahgunakan uang pajak dalam jumlah yang sangat besar yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Kasus tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa tidak percaya mereka terhadap fiskus pajak.

Sikap masyarakat Indonesia dalam memboikot bayar pajak tidak hanya dikarenakan munculnya kasus besar yang dilakukan Gayus, tetapi juga dikarenakan pengelolaan dan pengalokasian uang hasil pajak oleh pemerintah yang dirasa tidak tepat. Dalam sebuah artikel yang dimuat di mengatakan bahwa kasus makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 25 milyar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah dibidang pajak. Masyarakat menjadi malas bayar membayar pajak karena uang hasil pajak rawan disalahgunakan. Demikian disampaikan oleh pengamat perpajakan Kodrat Wibobo kepada detik Finance, Kamis (25/3/2010).

Maraknya pemberitaan mengenai Gayus ini akan berefek buruk terhadap upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Karena orang akan berfikir untuk apa membayar pajak kalau ternyata uangnya disalahgunakan, ungkap Pengamat Perpajakan dalam detikFinance.

Penerimaan yang dihimpun Direktorat Jendral Pajak diperkirakan tidak mencapai target yang ditetapkan APBN Perubahan atau APBN-P 2010, yakni Rp 604,4 triliun. Akibat dampak berbagai kasus kriminal perpajakan, seperti yang melibatkan Gayus Tambunan, penerimaan

Ditjen Pajak diperkirakan hanya mencapai 99,5 persen dari target. Penerimaan Ditjen Pajak yang dibawah target tersebut dengan sendirinya menurunkan proyeksi penerimaan perpajakan secara keseluruhan, baik penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai.

Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini akan diberi judul “IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana persepsi para Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak dan perpajakan di Indonesia setelah adanya kasus Gayus Tambunan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan:

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan mampu menganalisis perpajakan di Indonesia setelah adanya kasus Gayus Tambunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Penulis

Memberikan tambahan informasi mengenai persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak yang dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembeding bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah ini kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi khususnya.

3. Bagi Institusi Perpajakan Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan sejauh mana kewajiban para Wajib Pajak dalam membayar kewajiban untuk membayar pajak setelah adanya Kasus Gayus Tambunan.